

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian hingga saat ini tetap memegang peran krusial sebagai penyedia utama lapangan kerja bagi masyarakat di wilayah pedesaan Pulau Jawa. Namun, kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja mengalami penurunan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemajuan mekanisasi pertanian, konversi lahan, serta meningkatnya migrasi tenaga kerja ke sektor industri dan jasa yang dianggap menawarkan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya berhasil mendorong perluasan kesempatan kerja secara merata, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran terselubung dan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap variabel ekonomi yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, seperti nilai tukar petani, produk domestik regional bruto sektor pertanian, inflasi, dan upah minimum provinsi, sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kemampuan sektor tersebut dalam mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian pedesaan. Pendapat ini sejalan dengan temuan penelitian yang mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor jasa di Indonesia, sehingga menuntut kebijakan yang tepat demi mempertahankan peran strategis sektor pertanian sebagai penopang utama kesempatan kerja (Alexandi dan Marshafeni, 2013).

Transformasi struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di Pulau Jawa tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka teori dualistik Lewis dua sektor. Teori ini memandang perekonomian negara berkembang tersusun atas sektor tradisional (pertanian) yang bersifat subsistensi dengan surplus tenaga kerja dan produktivitas marjinal yang sangat rendah, serta sektor modern (industri dan jasa) yang bersifat kapitalistik dengan produktivitas dan tingkat upah yang lebih tinggi (Lewis, 1954). Dalam kondisi surplus tenaga kerja, perpindahan buruh dari sektor pertanian ke sektor modern pada tahap awal tidak menurunkan output pertanian, tetapi justru meningkatkan efisiensi alokasi tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sampai pada titik Lewis Turning Point ketika surplus tenaga kerja habis dan upah riil mulai meningkat di kedua sektor. Dengan demikian, perubahan nilai tukar petani, produk domestik regional bruto sektor pertanian, inflasi, dan upah minimum provinsi di provinsi Pulau Jawa dapat dipahami sebagai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika upah dan penyerapan tenaga kerja antar kedua sektor dalam kerangka teori Lewis dua sektor.

Selama periode 2020 hingga 2024, Pulau Jawa mengalami kecenderungan kenaikan inflasi dan variasi pertumbuhan upah minimum provinsi di berbagai wilayah, di mana dinamika tersebut berpeluang besar memengaruhi daya beli petani serta struktur biaya produksi pada sektor pertanian. Peningkatan inflasi umumnya menyebabkan penurunan kemampuan riil petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari ataupun membiayai input produksi, sementara perubahan upah minimum provinsi membawa konsekuensi ganda di satu pihak meningkatkan kesejahteraan pekerja pertanian, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi

permintaan tenaga kerja, khususnya pada subsektor yang berkarakter padat karya. Meskipun produk domestik regional bruto sektor pertanian menunjukkan tren peningkatan tahunan, jumlah tenaga kerja yang terserap justru cenderung menurun selama lima tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2024). Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh adanya mekanisasi usaha tani serta pergeseran struktur ekonomi penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, selain juga dipengaruhi fluktuasi nilai tukar petani sebagai indikator utama kesejahteraan rumah tangga petani. Penurunan nilai nilai tukar petani berpotensi menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian, sedangkan inflasi yang tinggi dapat memperkecil margin keuntungan yang diperoleh petani (Warapsari et al., 2020).

Menurut Simanjuntak (2018), penyerapan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor ekonomi, tingkat upah, serta dinamika harga yang tercermin dalam inflasi. Dalam konteks sektor pertanian, Badan Pusat Statistik (2023) menegaskan bahwa produk domestik regional bruto sektor pertanian dan nilai tukar petani merupakan faktor penting yang memengaruhi kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja, sementara inflasi dan kebijakan upah minimum dapat memberikan tekanan terhadap permintaan tenaga kerja. Perbedaan pengaruh antar variabel tersebut menunjukkan perlunya kajian empiris lanjutan dengan menggunakan data yang lebih mutakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh simultan Nilai Tukar Petani, Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian, inflasi, dan Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian provinsi di Pulau Jawa periode 2020 hingga 2024.

Tabel 1.1 Perbandingan Proporsi Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Pulau Jawa (Persen) dan Nasional (Juta Orang) Tahun 2020-2024

TAHUN	NASIONAL	PROVINSI					
		DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Tengah	DIY	Banten
2020	38,22	0.07	0.17	0.34	0.27	0.21	0.13
2021	35,9	0.06	0.16	0.32	0.25	0.17	0.11
2022	35,91	0.05	0.15	0.31	0.24	0.18	0.12
2023	36,46	0.04	0.15	0.31	0.25	0.19	0.12
2024	40,75	0.04	0.15	0.28	0.26	0.19	0.13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Dari tabel diatas menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020 hingga 2024. Tenaga kerja ini mencakup subsektor tanaman padi (seperti padi, jagung, kedelai dan umbi-umbian), hortikultura (sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman obat), perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan kakao), peternakan (sapi, ayam, babi, dan unggas lainnya), perikanan (budidaya ikan tawar, payau, dan laut), kehutanan (pengelolaan hutan kayu dan non kayu), serta jasa pertanian (seperti penyuluhan dan pengolahan pascapanen).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian di Indonesia serta beberapa provinsi di Pulau Jawa menunjukkan dinamika yang berfluktuasi selama periode 2020-2024. Secara nasional, jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian tercatat sebesar 38,22 juta jiwa pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi 35,9 juta jiwa pada tahun 2021 dan relatif stabil pada angka 35,91 juta jiwa pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 36,46 juta jiwa dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 40,75 juta jiwa pada tahun

2024. Pada tingkat provinsi di Pulau Jawa, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam jumlah tenaga kerja sektor pertanian. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya serta menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, provinsi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang relatif lebih rendah. Variasi jumlah tenaga kerja sektor pertanian antarprovinsi tersebut mencerminkan adanya dinamika dalam penyerapan tenaga kerja yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, khususnya pada sektor pertanian di Pulau Jawa.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020-2024, terlihat bahwa peran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja masih relatif kecil dan pada beberapa wilayah menunjukkan kecenderungan menurun. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tercatat memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan kisaran masing-masing antara 0,28% hingga 0,34% dan 0,24% hingga 0,27%. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Barat berada pada tingkat menengah dengan kisaran sekitar 0,15% hingga 0,21%. Di sisi lain, Provinsi Banten dan DKI Jakarta menunjukkan persentase yang relatif lebih rendah, dengan kisaran masing-masing antara 0,11% hingga 0,13% dan 0,04% hingga 0,07%. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja pada

sektor pertanian di Pulau Jawa masih terbatas serta memperlihatkan kecenderungan penurunan pada beberapa provinsi selama periode pengamatan.

Pada periode 2020 hingga 2024, nilai tukar petani di beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Banten, terlihat bahwa secara umum terjadi fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada periode akhir pengamatan. Pada tahun 2020 dan 2021 beberapa provinsi seperti Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten memiliki nilai tukar petani di bawah 100, yang menunjukkan kondisi petani yang relatif rendah. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024 sebagian besar provinsi mengalami peningkatan nilai tukar petani bahkan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024, terutama di Jawa Tengah sebesar 114,21%, Jawa Timur 112,21% dan Jawa Barat 112,17%. Peningkatan nilai tukar petani tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan petani. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani, serta adanya pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemik COVID-19 yang mendorong peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian. Selain itu, sektor pertanian cenderung memiliki tingkat ketahanan yang relatif baik dibandingkan sektor produksi dan pendapatan petani selama periode pemulihan ekonomi.

Kondisi ekonomi petani umumnya dianalisis menggunakan indikator nilai tukar petani. Nilai tukar petani dihitung melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Indikator ini mencerminkan kemampuan daya tukar petani terhadap berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi maupun input produksi yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin besar kemampuan daya beli

petani terhadap barang konsumsi dan sarana produksi pertanian. Dengan demikian, nilai tukar petani digunakan sebagai indikator relatif untuk menggambarkan perubahan kondisi ekonomi petani dari waktu ke waktu. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan adanya perbaikan daya beli petani secara relatif (Sumodiningrat, 2001). Lebih lanjut, Mayshuri (2007) menyatakan bahwa belum terdapat indikator yang secara khusus dirancang untuk mengukur kondisi ekonomi petani, sehingga nilai tukar petani menjadi indikator utama yang banyak digunakan dalam analisis pembangunan pertanian. Fenomena yang muncul selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja di Pulau Jawa. Meskipun produk domestik regional bruto sektor pertanian di sebagian besar provinsi mengalami peningkatan, proporsi tenaga kerja tetap tinggi dan bahkan cenderung meningkat di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan output sektor pertanian belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan kuantitas kesempatan kerja, serta masih didominasi oleh pola kerja yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor ekonomi makro yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, khususnya dalam konteks provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan pertanian yang tidak hanya

berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan sektor pertanian yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional.

Produk domestik regional bruto sektor pertanian di Pulau Jawa pada periode 2020 hingga 2024, seluruh provinsi menunjukkan kecenderungan peningkatan meskipun dengan variasi laju pertumbuhan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian, yang terlihat dari nilai yang terus mengalami peningkatan sepanjang periode observasi. Jawa Barat juga mencerminkan pola pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara itu, provinsi dengan kontribusi lebih rendah seperti DI Yogyakarta dan Banten tetap memperlihatkan pertumbuhan positif meskipun nilainya masih berada di bawah provinsi dengan kontribusi besar. DKI Jakarta memiliki nilai paling kecil dibandingkan provinsi lainnya, namun tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan bahwa sektor pertanian di Pulau Jawa mengalami perkembangan positif dan terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian regional, sekalipun tingkat kontribusinya bervariasi antar provinsi.

Tingkat inflasi di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya variasi dan dinamika yang berbeda di setiap wilayah. Provinsi DKI Jakarta mencatat tingkat inflasi yang relatif stabil dengan kisaran antara 1,6% persen hingga 1,89%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terlihat di Provinsi Jawa Barat, dengan tingkat inflasi yang berada pada kisaran 1,60% hingga

2,18%. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami peningkatan inflasi yang cukup tinggi pada periode tertentu, masing-masing mencapai 6,52% di Jawa Timur dan 5,51% di Jawa Tengah. Di sisi lain, Provinsi DI Yogyakarta dan Banten juga menunjukkan fluktuasi tingkat inflasi dengan kisaran antara 0,82% hingga 5,51% di DI Yogyakarta serta 1,45% hingga 5,08% di Banten. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Pulau Jawa cenderung mengalami fluktuasi baik antarprovinsi maupun antarperiode, yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian dan aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah.

Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak pada nilai tukar petani sebagai variabel utama yang dianalisis secara simultan bersama produk domestik regional bruto sektor pertanian, inflasi, dan upah minimum provinsi dalam memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, dengan fokus wilayah provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan periode pengamatan terbaru 2020 hingga 2024. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menganalisis penyerapan tenaga kerja secara agregat atau hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan upah, penelitian ini menempatkan nilai tukar petani sebagai indikator ekonomi petani yang relevan dalam menjelaskan dinamika pasar tenaga kerja sektor pertanian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terdahulu serta memberikan kontribusi empiris baru dalam kajian pembangunan pertanian dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Putra (2021) produk domestik regional bruto sektor pertanian di Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi

selama periode penelitian. Pertumbuhan nilai produk domestik regional bruto sektor pertanian dan upah minimum provinsi Jambi secara signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada wilayah tersebut. Temuan ini menegaskan adanya hubungan yang sangat signifikan antara perkembangan ekonomi sektor pertanian dan kondisi upah minimum dengan dinamika penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kebijakan upah minimum perlu terus diperhatikan sebagai faktor kunci dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di sektor ini, guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

Perkembangan tingkat inflasi di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2020 hingga 2024 menggambarkan dinamika yang beragam antar wilayah. Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan inflasi yang drastis sejak tahun 2020 dan tetap berada pada level rendah dengan fluktuasi kecil hingga tahun 2024. Jawa Barat juga menunjukkan tren penurunan dan stabilitas di kisaran 0,25% hingga 1,67% sepanjang tahun-tahun berikutnya. Jawa Timur menunjukkan pola kenaikan inflasi dan melonjak tajam hingga mencapai 6,66% pada tahun 2023, sebelum kembali menurun ke angka 0,64% pada tahun 2024.

Sementara itu, Jawa Tengah mencatat inflasi yang cukup tinggi pada 2020 sebesar 5,25%, disusul oleh fluktuasi inflasi rendah di kisaran 0,30% sampai 0,62% pada tahun-tahun berikutnya. DI Yogyakarta secara konsisten mencatat inflasi rendah dan relatif stabil, dengan nilai terendah pada 2021 yang mencapai -0,25%. Sedangkan Banten menunjukkan penurunan dan fluktuasi stabil antara 0,23% hingga 1,29% pada periode 2020 hingga 2024. Perbedaan pola inflasi antar

provinsi ini mencerminkan kondisi ekonomi yang berbeda serta tantangan spesifik masing-masing wilayah. Fluktuasi inflasi dan tingkat pertumbuhannya berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada sektor-sektor seperti pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik inflasi di tiap provinsi menjadi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan regional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salim et al., (2021) inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB, Hal yang menyebabkan meningkatnya inflasi di Indonesia salah satunya dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang berakibat naiknya harga BBM, harga sembako, menurunnya minat masyarakat membeli, bahkan meningkat drastisnya pengangguran di Indonesia.

Negara berkembang umumnya menghadapi masalah ekonomi berupa tingginya tingkat inflasi sekaligus pertumbuhan ekonomi yang lambat. Inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian, di mana upaya untuk menjaga laju pertumbuhannya agar tetap rendah dan stabil sangat diperlukan guna mencegah munculnya masalah makroekonomi yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi memiliki dampak yang bersifat positif dan negatif terhadap perekonomian. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan tingkat suku bunga. Tingginya dan ketidakstabilan inflasi mencerminkan ketidakseimbangan dalam perekonomian yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang pada

akhirnya berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin besar pula kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat tingginya harga barang dan jasa, sehingga meningkatkan kemiskinan. Tingkat inflasi di Indonesia sendiri mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Amir et al., 2021).

Upah minimum provinsi di wilayah Pulau Jawa mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Di DKI Jakarta, nilai Upah Minimum Provinsi meningkat dari Rp4.276.350 pada tahun 2020 menjadi Rp5.067.381 pada tahun 2024. Demikian pula, provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten menunjukkan tren peningkatan upah minimum provinsi secara konsisten selama periode yang sama. Kenaikan upah minimum provinsi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus berdampak pada biaya produksi di sektor pertanian. Oleh karena itu, analisis pengaruh upah minimum provinsi dengan variabel lain seperti nilai tukar petani, produk domestik regional bruto sektor pertanian, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian provinsi di Pulau Jawa pada rentang waktu 2020 hingga 2024 menjadi sangat penting untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja di sektor ini secara komprehensif (Badan Pusat Statistik, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan kenaikan upah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yang sejalan dengan teori upah (Buchari, 2015). Sementara itu penelitian lain dari Indradewa dan Natha (2015) menunjukkan adanya hubungan positif antara upah dan penyerapan tenaga kerja dimana

kenaikkan upah dianggap sebagai insentif bagi tenaga kerja terampil. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pada faktor penentu penyerapan tenaga kerja, sedangkan penelitian ini fokus pada pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut penelitian oleh Latri dan Henny (2018) upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terbukti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat negatif, sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja yang menjelaskan bahwa kenaikan upah menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, dan sebaliknya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan. Artinya, peningkatan kegiatan produksi memerlukan input produksi berupa tenaga kerja yang meningkat pula.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menggunakan variabel yang jarang digunakan yaitu nilai tukar petani, produk domestik regional bruto sektor pertanian, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Sehingga penulis membuat judul penelitian **“Pengaruh Nilai Tukar Petani, Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh nilai tukar petani, produk domestik regional sektor pertanian, inflasi, dan upah minimum provinsi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh nilai tukar petani, produk domestik regional bruto sektor pertanian, inflasi, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa tujuan yang merupakan ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh nilai tukar petani, produk domestik regional bruto sektor pertanian, inflasi, dan upah minimum provinsi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020-2024?
2. Mengetahui pengaruh nilai tukar petani, produk domestik regional bruto sektor pertanian, inflasi, dan upah minimum provinsi bersama-sama terhadap

penyerapan tenaga kerja sektor pertanian provinsi di Pulau Jawa pada periode 2020-2024?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik mengenai pengaruh nilai tukar petani terhadap dinamika ekonomi pertanian. Selain itu, nilai tukar petani sebagai indikator sentral kesejahteraan petani yang memediasi hubungan antara harga komoditas, upah tenaga kerja, dan ketahanan sektor pertanian di tingkat regional.

2. Manfaat Praktis

Secara teori penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan petani secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pelaku sektor pertanian untuk memahami dinamika ekonomi yang memengaruhi tenaga kerja dalam usaha pertanian.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini peneliti telah melakukan penelitian pada Badan Pusat Statistik.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026, dimulai sejak bulan Oktober 2025 dengan pengajuan judul kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan dan penulis memperkirakan penelitian ini selesai pada bulan Juni 2026 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 1.5.2 Jadwal Penelitian

[illegible]